

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group: Depok. Edisi Kedua.
- Pruit, Dean G dan Jeffey, Z. Rubin. (2004) *Teori Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar: Jakarta.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia: Jogjakarta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika,

Jurnal

- Huda, N. M. (2015). Hukum pemerintahan desa: dalam konstitusi Indonesia sejak kemerdekaan hingga era reformasi. Malang, SETARA PRESS. Hlm. 32.
- Jihan. (2023). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Dampak Positif Adanya Pemekaran Desa bagi Masyarakat*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Mahendra, I., & Murlianti, S. (2024). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Desa Antara Masyarakat Desa Muara Bengkal Ilir Dengan Desa Ngayau Kabupaten Kutai Timur.
- Masyitah, S. (2012). Penyelesaian Konflik dalam Penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Nurfadila Ulfa, analisis penyelesaian konflik batas wilayah pemekaran oleh bagian tata pemerintahan dan otonomi daerah di sekretariat daerah kabupaten kampar, Riau: universitas islam negeri sultan syarif kasim, 2020.

Rahman, M. F., & Asikin, Z. (2020). Pola penyelesaian konflik batas wilayah antar desa pasca program pendaftaran tanah sistematis lengkap (pts1) tahun 2019 di kabupaten lombok timur. *Jurnal education and development*, 8(2), 344-344.

Sitanggang, Ita Juniarty. (2023). Penyelesaian Konflik Dalam Penegasan Batas Wilayah Antar Desa Padang Mahondang dengan Desa Sei Paham.

Sumitro, Maskun. (1993). *Pembangunan Masyarakat Desa*, Yogyakarta: Media Madya Mandala. Hlm. 48.

Undang-Undang

Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

PERMENDAGRI Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa